



Media cetak: Bangka Pos Babel Pos
 Babel News Radar Bangka
 Rakyat Pos Lainnya: _____

Tanggal:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Bulan:

1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12

Thn:

2
0
1
7

Halaman:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Anggaran Pendidikan Capai Rp 700 Miliar

APBD Pemprov Babel Naik Jadi Rp 2,6 Triliun

PANGKALPINANG, BANGKA POS -- Pemerintah Provinsi Bangka Belitung memastikan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2017 lebih banyak yang pro rakyat. Misalnya anggaran bidang pendidikan dari 20 persen meningkat menjadi 28 persen lebih atau Rp 700 miliar.

Sekretaris Daerah, Yan Megawandi mengatakan APBD Babel tahun 2017 mencapai Rp 2.6 triliun, meningkat sekitar Rp 200 miliar dari tahun 2016 Rp 2,4 triliun.

"Meningkatnya anggaran pendidikan, hingga 28 persen lebih salah satu contoh APBD Babel berpihak ke rakyat," kata Yan, Rabu (1/1).

Yan menceritakan untuk anggaran pendidikan yang 28 persen dari total APBD provinsi cukup menjadi

perhatian serius Kemendikbud RI. Pasalnya, untuk anggaran pendidikan pemerintah menargetkan minimal 20 persen, namun di Babel lebih besar yaitu 28 persen.

"Kalau kita lihat postur APBD Babel itu kan belanja pegawai masih jauh dibawah 50 persen, masi sangat wajar, belanja pendidikan kita 28 persen, ini bahkan kemarin biro perencanaan kemendikbud ingin mengajak pak plt guberenmr menjadi narasumber menyampaikan pengalaman Babel dalam menyusun agenda anggaran pendidikan, karena kita lewat 20 persen," ujarnya.

Yan mengungkapkan pendidikan dan kesehatan cermin kebutuhan dasar, kebutuhan basis, selain itu dia kembali menambahkan Pemerintah Babel juga terus berupaya memberikan

subsidi kepada masyarakat untuk intervensi harga.

"Kita terus berupaya mensubsidi harga pangan dalam bentuk operasi pasar," ucapnya.

Plt Gubernur Babel, Yuswandi A Temenggung mengatakan APBD Provinsi hampir semua merupakan program pro rakyat. Ia mencontohkan dana belanja langsung dan tidak langsung.

"Teman-teman SKPD mengidentifikasi debat antara belanja langsung dan tidak langsung," ujar Yuswandi.

Untuk pembayaran gaji pegawai yang cukup banyak bertambah, Yuswandi mengatakn hal tersebut termasuk juga pro rakyat.

"Kewenangn itu perpindahan, provinsi yang harus bayar, itu masuk pro rakyat," katanya. (L4).